

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas Salim, H.A. 1993, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya. 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Mertokusumo, Sudikno. 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, Hasim. 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Purwosutjipto. 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekardono, R. 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono, Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Subekti. 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penelitian Hukum :

Susalit Tejo Narko, 2008, Analisis Kebijakan Program Bus Trans Jogja Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dikaitkan Dengan Teori Kebijakan Publik, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet :

<http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-transportation/public/trans-jogja>, diakses pada Sabtu, 16 Januari 2016 pukul 22.53 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2436/class-action>, diakses pada Minggu, 28 Februari 2016 pukul 19.36 WIB